

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

(School Based Management)

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd



Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia
FKIP Universitas Jember

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (*School Based Management*)

Copyright © Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd

Penulis Bambang Soepeno
Sampul & Tata Letak Artjuna

Cetakan Pertama, Januari 2022

ISBN 978-602-616611-7-7

PENERBIT

Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia
FKIP Universitas Jember

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
Korwil Jawa Timur; NO KTA: 002.095.1.05.2019



Kutipan Pasal 44

SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TAHUN 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

PRAKATA

PENULISAN buku Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) dilatar-belakangi oleh beberapa pertimbangan, antara lain adalah: (1). Terbatasnya ketersediaan buku Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah mengakomodasi kebijakan-kebijakan baru dibidang pendidikan; 2). Masih ditemuinya ketidak-seragaman buku MBS sebagai sumber utama dalam perkuliahan, baik di level jurusan dan program studi; (3). Banyak buku MBS yang belum mengkaitkan dengan struktur organisasi mulai dari pusat (Kemendikbud-Ristek), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota samapai pada struktur organisasi di tingkat satuan pendidikan (Sekolah).

Keterbatasan sumber belajar tersebut mengakibatkan pemahaman mahasiswa tentang MBS sangat sempit dan dangkal, hal ini berdampak pada saat mahasiswa mengikuti program praktek mengajar di sekolah. Hal serupa juga dijumpai ketika mahasiswa sudah lulus dan bekerja sebagai guru di sekolah juga menghadapi masalah karena pemahaman tentang MBS sangat terbatas

Dalam buku ini dibahas beberapa hal terkait dengan “Manajemen Berbasis Sekolah” (*School Based Management*) yang dituangkan ke dalam 6 (enam) Bab. Secara rinci isi buku ini adalah sebagai berikut: Bab. I. Organisasi Pendidikan, Bab. II. Sekolah sebagai Sub-sistem Organisasi Pendidikan, Bab.III. Tupoksi Penyelenggara Organisasi Pendidikan di Level Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, dan di Sekolah, Bab. IV. Manajemen Pendidikan;

Bab. V. Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*), Bab. VI. Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Redaaksional penulisan dalam buku ini ditulis secara ringkas dengan menggunakan tata-bahasa yang mudah dimengerti, dengan harapan agar mahasiswa dan pembaca lainnya dapat dengan mudah memahami substansi isi bahasanya. Kendatipun penulis sudah berusaha maksimal untuk menghasilkan suatu karya tulis ilmiah yang bermutu, tentunya masih ada beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan. Oleh karenanya terbitan edisi pertama buku ini akan disempurnakan pada edisi berikutnya, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan suatu karya tulis ilmiah yang mendekati sempurna.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu atas sumbangsihnya sehingga karya ilmiah yang sederhana ini dapat diselesaikan, tanpa ada hambatan yang berarti. Akhir kata mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi waraga akademisi pada umumnya, dan bagi mahasiswa pada khususnya sebagai referensi dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

Salam hormat penulis,

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd

KATA PENGANTAR

BUKU “Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) ini menyajikan secara komprehensif dan integral dengan sistem organisasi pendidikan di Indonesia. Tidak layaknya buku-buku sejenis yang sudah terbit, dimana isi (*content*) nya disajikan secara parsial, tidak terintegrasi ke dalam satu buku. Sehingga pembaca kesulitan untuk memahami keterkaitan antara manajemen sekolah dengan tata kelola organisasi pendidikan, baik di level pusat, provinsi dan di level organisasi di kabupaten/kota.

teori dan aplikasinya dalam suatu penelitian.

Kelebihan lain dari isi buku ini jika dibandingkan dengan buku-buku sejenis yang sudah beredar, adalah upaya penulis untuk menjelaskan secara detail tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) penyelenggara pendidikan baik ditingkat kabupaten/kota sampai pada penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan.. Dengan mempelajari isi buku ini, akan sangat membantu dosen pengampu dan mahasiswa terkait dengan: (a). Menjelaskan (mengeksplanasi) bidang garapan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat satuan pendidikan , (b). Membantu dosen pengampu mata kuliah MBS dan mahasiswa untuk memahami teori-teori manajemen; (c). Membantu dosen pengampu mata kuliah MBS dan mahasiswa untuk memahami sistem organisasi di tingkat kabupaten/kota dan ditingkat sekolah. dan (d). Membantu dosen pengampu mata kuliah MBS dan

Digital Repository Universitas Jember

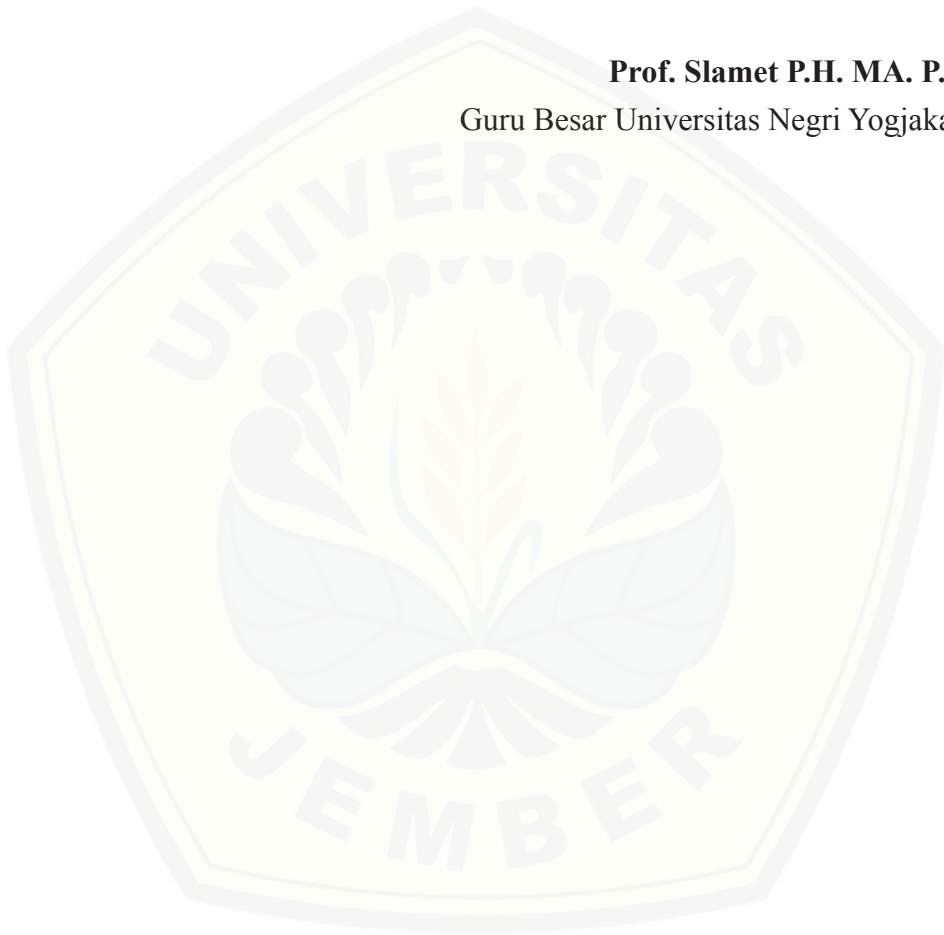
mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan manajemen pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat satuan pendidika.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan isi buku di atas, saya merekomendasikan kepada para akademisi, dan para mahasiswa untuk menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi pustaka pribadinya.

Jember, 01 Januari 2022

Prof. Slamet P.H. MA. P.hD

Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta



DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	xi
BAB. I. ORGANISASI PENDIDIKAN	
1.1. Dasar Organisasi Pendidikan	1
1.2. Pola Interaksi Antar-Komponen Sistem Organisasi Pendidikan	3
1.3. Prinsip-Prinsip Tata-kelola Organisasi Pendidikan	4
1.4. Etika Dalam Tata Kelola Organisasi Pendidikan	8
1.5. Kerja Tim (<i>Team Works</i>) Dalam Organisasi Pendidikan	10
BAB. II. SEKOLAH SEBAGAI SUB-SISTEM ORGANISASI PENDIDIKAN	
2.1. Organisasi Sekolah Sebagai Sub-sistem Pendidikan	20
2.2. Hubungan Fungsional Sekolah Dengan MGMP dan KKG	21
2.3. Hubungan Fungsional Sekolah Dengan Subdin. Dikdasmen (SD, SMP dan SMA/K)	23
2.4. Hubungan Fungsional Sekolah Dengan Dinas Pendidikan	24

BAB. III. TUPOKSI PENYELENGGARA ORGANISASI PENDIDIKAN DI LEVEL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI, DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DAN DI SEKOLAH	
3.1. Konsep Dasar Tupoksi	26
3.2. Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota	27
3.3. Tupoksi Pengelola Gugus Sekolah	37
3.4. Tupoksi Pengelola Satuan Pendidikan (Sekolah)	39
BAB. IV. MANAJEMEN PENDIDIKAN	
4.1. Pengertian Manajemen Pendidikan	120
4.2. Teori teori Manajemen Pendidikan	131
BAB. V. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (<i>School Based Mangement</i>)	
5.1. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah	138
5.2. Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah	141
5.3. Tujuan dan Karakteristik MBS	143
5.4. Visi, Misi dan Target Mutu	146
5.5. Pelaksanaan MBS	159
5.6. Peran Kepala Sekolah Dalam MBS	170
5.7. Peran Komite Sekolah Dalam MBS	173
BAB. VI. PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM) DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	
6.1. Organisasi Masyarakat Di Bidang Pendidikan	176
6.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Melalui Dewan Pendidikan	181
6.3. Pendekatan Kebijakan Dalam Pemberdayaan Masyarakat	185
6.4. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat	188
6.5. Indikator Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat	190
6.6. Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan	193
6.7. Peran dan fungsi Komite Sekolah	201

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1. Model Teori Dua-Faktor Frederic Herzberg (Soepeno,2010)	12
Tabel 3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Guru Mata Pelajaran	54
Tabel.3.2. Kinerja Guru Dalam Menyiapkan RPP	59
Tabel 3.3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Komite Sekolah/Madrasah	64
Tabel 3.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Perpustakaan	89
Tabel 3.5. Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Perpustakaan	93
Tabel 3.6. Kompetensi dan Tupoksi Kepala Administrasi	109
Tabel 3.7. Kompetensi dan Tupoksi Pelaksana Urusan Administrasi Umum	114
Tabel. 5.1. Contoh Visi dan Indikatornya	147
Tabel. 5.2. Contoh Target Mutu Sekolah	149
Tabel 5. 3. Format 1. Kondisi Kerja	153
Tabel 5.4. Format: 2 Format Identifikasi Sendiri (Form for Self-Identification of Organization	154
Tabel. 5.5 Format: 3 FORMAT ANALISIS SWOT	156
Tabel. 5.6. Format: 4 FORMAT ANALISIS SWOT	156
Tabel. 5.7. Untuk Menentukan Skala Prioritas Program Kerja	157

Tabel. 5.8. Perencanaan Strategik Tahun 2021/2022	158
Tabel. 5.9. Sasaran Program Kerja	158
Tabel: 6.1. Aspek-Aspek Tingkat Partisipasi	189
Tabel: 6.2. Contoh Indikator Kuantitatif	
Untuk Mengukur Partisipasi Masyarakat	191
Tabel: 6.3. Contoh indikator kualitatif	
Untuk mengukur partisipasi masyarakat	193
Tabel. 6.4. Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan sebagai Mitra	
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	194



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Hubungan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dengan Sekolah (Permendiknas No. 47 Tahun 2016)	2
Bagan 1.2. Hubungan Kepentingan Individu dan Kepentingan Organisasi	6
Bagan 1.3. Proses Pembentukan Etika Organisasi	8
Bagan 1.4. Komponen-komponen Faktor Internal Team Works	14
Bagan 1.5. Komponen-komponen Faktor Eksternal Team Works	15
Bagan 1.6. Proses Penyelenggaraan Capacity Building	17
Bagan 1.7. Proses Pengukuran Performansi Team Works	19
Bagan 2.1. Interelasi Organisasi Gugus, Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah	22
Bagan 2.2. Hubungan Fungsional Organisasi Sekolah dengan Subdin/Kabid Dikdas	24
Bagan 2.3. Hubungan Fungsional organisasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	25
Bagan 3.1. Struktural Organisasi Gugus (MGMP)	39
Bagan 3.2. Keterkaitan Antar-Tupoksi Kepala Sekolah	44
Bagan. 4.1. Keterkaitan Kegiatan Manajemen dengan Kegiatan lain dalam Organisasi	124
Bagan. 4.2. Bagan Proses Manajemen	126
Bagan 5.1. Diagram Analisis SWOT (Strength/Kekuatan-Weakness/ kelemahan Kelemahan Opprtunity/Peluang-Threat/Ancaman)	152
Baga. 5.2. Proses Penyusunan Rencana Program Kerja	159

Bagan.6.1. Model Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan di Indonesia	179
Bagan. 6.2. Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam Penyelenggaraan Pendidikan	179
Bagan 6.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat	184
Bagan 6.4. Proses pembentukan dewan pendidikan berdasarkan SK. MENDIK- NAS NOMOR 044/U/2002.....	199
Bagan 6.5. Proses Seleksi Pengurus Dewan Pendidikan	200



BAB. I

ORGANISASI PENDIDIKAN

1.1. Konsep Dasar Organisasi Pendidikan

Organisasi dapat dipahami sebagai wadah terselenggaranya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai ahli mendefinisikan organisasi merupakan proses interaksi individu untuk mencapai tujuan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Organisasi juga dapat dipahami sebagai institusi yang memiliki kaidah normative yang mengatur sekelompok orang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan bersama.

Organisasi dalam proses mencapai tujuan menurut Hoy dan Miskel, 1982 (dalam Soepeno, 2010). dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu. Faktor-faktor penentu itu meliputi proses kepemimpinan, pemberian motivasi, sistem komunikasi, proses pengaruh-interaksi, proses pengambilan keputusan, perumusan dan pencapaian tujuan, dan proses control.

Ditinjau dari komponen pembentuknya, organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem sebagai komponen atau unsur pembentuknya. Dalam konteks sekolah, keefektifan suatu organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya, tidak lepas dari kontribusi sistem organisasi pendidikan yang lebih luas. Di dalam sistem organisasi pendidikan terdapat struktur dan tugas yang terstratifikasi mulai dari sistem organisasi di tingkat pusat (Depdikbud-Ristek), tingkat provinsi (Dinas pendidikan provinsi), tingkat kabupaten/kota (Dinas

BAB. II

SEKOLAH SEBAGAI SUB-SISTEM ORGANISASI PENDIDIKAN

2.1. Organisasi Sekolah Sebagai Sub-sistem Pendidikan

Sekolah sebagai sub-system organisasi pendidikan dalam mewujudkan visi dan misinya tidak dapat terlepas sepenuhnya dengan system pendidikan di atasnya atau organisasi superiornya. Dukungan manajerial pengembangan organisasi sekolah oleh Dinas pendidikan kabupaten/kota mempertimbangkan masukan dari Dewan pendidikan. Sedangkan dukungan pembinaan teknis terhadap pengembangan kapasitas penyelenggara organisasi sekolah dilakukan oleh koordinator pengawas sekolah (Korwas).

Operasional dukungan terhadap sekolah pada level kecamatan dalam realitanya dihadapkan pada kendala transportasi, karena keberadaan sekolah secara geografis tersebar tidak merata, sehingga proses koordinasi, komunikasi dan konsultasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Pengawas kurang efektif. Salah satu solusinya adalah dibentukkan MGMP (gugus Sekolah Menengah Pertama) dan KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk SD, yaitu wadah organisasi independen sebagai tempat pengembangan kapasitas para penyelenggara organisasi sekolah. Sehingga dukungan manajerial Dinas pendidikan dan layanan teknis pembinaan kapasitas pengawas juga diberikan pada level MGMP dan KKG. Berdasarkan pola dukungan tersebut di atas, maka secara structural pengembangan organisasi sekolah mempunyai hubungan fungsional dengan struktur Dinas pendidikan, pengawas sekolah dan MGMP/KKG.

BAB. III

TUPOKSI PENYELENGGARA ORGANISASI PENDIDIKAN DI LEVEL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI, DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DAN DI SEKOLAH

3.1. Konsep Dasar Tupoksi

Tupoksi (Tugas Pokok dan Tupoksi) adalah tanggungjawab, kewajiban, dan wewenang yang melekat pada seseorang yang berada dalam struktur organisasi. Suatu organisasi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pendidikan merupakan organisasi yang diselenggarakan dengan melibatkan banyak orang yang saling berinteraksi satu dengan lainnya dalam rangka mencapai tujuan, tentunya harus memper tanggung jawabkan kinerjanya kepada pelanggannya.

Oleh karena organisasi pendidikan terstruktur mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah, dimana setiap tingkatan struktur organisasi memiliki tupoksi dan tupoksi yang berbeda, maka tupoksi para pelaksananya juga berbeda. Dalam implementasinya tupoksi pelaku pendidikan di atasnya berkewajiban memfasilitasi dan member advokasi kepada para pelaku organisasi dibawahnya dalam menjalankan tupoksinya. Sedangkan pelaku organisasi dibawahnya berkewajiban untuk melakukan konsultasi kepada para pelaku organisasi di atasnya, serta berkoordinasi dengan para pelaku organisasi sejawatnya (Mitra kerjanya).

BAB. IV

MANAJEMEN PENDIDIKAN

4.1. Pengertian Manajemen Pendidikan

Kata manajemen berasal dari bahasa latin yaitu “manegere” yang artinya menanganai, Di dalam bahasa Inggris dalam bentuk kerja *to manage* atau dengan kata benda *management*. Bebebrapa ahli mengkonsepsikan manajemen sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan mendayagunakan orang lain. Menurut Biro Perencanaan Depdikbud (1993:4) manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Manajemen pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang pada intinya adalah mempelajari tentang prilaku manusia yang kegiatannya sebagai subjek dan objek. Secara filosofis, prilaku manusia terbentuk oleh interaksi antar manusia, iklim organisasi (konteks organisasi), dan sistem. Ketiga interaksi tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saling berinteraksi pula dengan lingkungan eksternalnya.

BAB. V

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (*School Based Mangement*)

5.1. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan hak otonomi kepada sekolah untuk mengatur sekolahnya secara mandiri dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kemandirian tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara warga sekolah (Kepala sekolah, guru, tendikdan peserta didik) bersama warga masyarakat yang diwakili oleh Komite Sekolah. Pelibatan warga masyarakat (Komite Sekolah) dilakukan mulai pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan sekolah yang berkualitas.

Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau dalam Bahasa Inggrisnya disebut School Based Manajemen, ternyata mempunyai nama lain yaitu Self Managing School, Site Based Management, Collaborative School Management, atau Community Based School Management. Mallen, Ogawa, dan Kranz (dalam Abu Dohou, 2002) Memandang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai satu bentuk desentralisasi kepada sekolah untuk mengambil keputusan terkait dengan upaya pencapaian tujuan sekolah. Sedangkan Myers dan Stonehill (dalam Norkholis, 2003) MBS merupakan strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan ke masing masing sekolah sehingga, kepala sekolah, guru, peserta

4). Peran Komite Sekolah Sebagai Mediator

Sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, seperti :

- Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu.
- Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholders pendidikan di sekitar sekolah.
- Mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain di luar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah.
- Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dalam bentuk:
 - a) Menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari stakeholder pendidikan di sekitar sekolah.
 - b) Menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. F. Stoner James, D. (1996). Manajemen, Edisi Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo
- Armansyah. (2009). Peranan dan pemberdayaan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri di Kota
- Boston Public School. (2013). The boston school committee. Diakses tanggal 29 Juli 2013, pada <http://www.bostonpublicschools.org/committee>
- Department of Education Newfoundland. (2008). Building learning communities: a hand book for school council Diakses tanggal 10 Mei 2014, pada <http://www.ed.gov.nl.ca/edu/publications/k12/Handbook2ndedition.pdf>.
- Depdiknas. (2002). Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Depdiknas. (2003a). Acuan operasional dan indikator kinerja Komite Sekolah Jakarta: Dirjen Frontier School Division in Manitoba Canada. (2011). School committee resource manual Manitoba : Frontier School Division.
- Soepeno, Bambang, 2010, Tatakelola Organisasi Sekolah SMP yang Efektif (Kajian Teoritis dan Aplikasi). Penerbit PT. Armandelta Selaras, Jakarta ISBN. 789-979-058-032
- Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 4, Nomor 3, November 2014 Depdiknas. (2003b).
- Undang-Undang RI Nomor 20, tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Depdiknas. (2003c).
- Indikator kinerja dewan pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Depdiknas. (2005).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar

Nasional Indonesia Depdiknas. (2007).

Pemberdayaan dewan pendidikan dan Komite Sekolah, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Haryadi, Y., Meirawan, D., & Rahadi, A. (2006). Pemberdayaan komite sekolah: modul 1: penguatan kelembagaan Komite Sekolah Jakarta: Depdiknas

Khan, M., et.al. (2013). Impact of school councils on head teachers' efficiency.

Journal of educational research dept of education IUB Pakistan, 16(1), 15-26.

Kim A. (2004). Parent school partnership formation through the school council in Korea. *Educational Research for Policy and Practice*, 3, 127–139

Kinola, B.O. (2009). School based management committees: the Nigerian experience

The International Journal of Learning, 16(8), 421-430.

H.A.R. Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Koontz, Harold, Cryl O' Donnell, 1989. *Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Made Pidarta. 1999. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Neal, Richard G 1991, *School Based Management*, Indiana. National Educational service

Osorio, B, et.al. (2009). *Decentralized decision-making in schools the theory and evidence on school-based management*, Ontario Ministry of Education

Ontario Ministry of Education. (2002). *School councils: a guide for members Ontario*: Ontario Ministry of Education

Shrode, William. A and Dan Voich, Jr. 1974. *Organization and Management: Basic Sistem Concepts*. Malaysia: Irwin Book

Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga

Umaedi, 2004, Manajemen Mutu Berbasis sekolah/madrasah mengelola Pendidikan dalam era masyarakat berubah, Jakarta, Pusat kajian manajemen mutu Pendidikan

Suparlan, Tumenggung, A., & Meirawan, D. (2006). Pemberdayaan komitesekolah: modul 3 peningkatan wawasan kependidikan pengurus Komite Sekolah. Jakarta: Depdiknas

Soeryobroto, 2004 Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta, PT : Rineka Cipta, 2004)

Terry, G.R. 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi. Aksara

Zajda, J. (2009). *Decentralisation, school-based management, and quality*. New York: Springer

_____ Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.



Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd

Guru Besar Ilmu-ilmu Sosial di FKIP Universitas Jember. Menyelesaikan pendidikan S-1 tahun 1980 di FKIP-Universitas Jember program studi (prodi) Administrasi dan Supervisi Pendidikan lulus tahun 1984. Pada tahun 1985 melanjutkan studi Magister Pendidikan (S-2) di Pascasarjana IKIP-Malang program studi Manajemen Pendidikan, lulus tahun 1989. Tahun 1993-1994 mengikuti *Traing of The Trainers' Program* di *Deakin University* dan di *Latrobe University* Melbourne Australia, dan pada tahun 1995 melanjutkan studi program doktor (S-3) program studi Ilmu Sosial di Pascasarja Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 1999. Kareer di Universitas Jember sebagai dosen tetap di FKIP Universitas Jember sejak tahun 1987 sampai sekarang. Sekarang dipercaya menjabat Dekan FKIP Universitas jember sampai dengan tahun 2024. Disamping aktif sebagai dosen Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd diberi kepercayaan sebagai konsultan di Ditjen Dikdasmen (Direktorat Pembinaan SD dan Pembinaan-SMP) Kementerian Pendidikan Nasional RI sejak tahun 1999-2016. Di tengah-tengah kesibukannya di Ditjen Dikdasmen, Prof Dr. Bambang Soepeno, M.Pd dipercaya sebagai Sekjen Dewan Pendidikan Nasional sejak tahun 2009-2016, Ketua Tim Ahli (TA) Komisi X DPR-RI untuk menyusun RUU Sistem Perbukuan Nasional tahun 2008-2014, dan mengajar serta menguji thesis (S-2), dan disertasi (S-3) diberbagai Perguruan Tinggi sejak tahun 1999-sekarang. Pengalaman sebagai konsultan di luar Kemendiknas yang pernah dijalani, antara lain adalah sebagai berikut.

TENTANG PENULIS

- 1) *Asian Development Bank* (ADB) (a). Proyek “Pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model” di Departemen Agama RI pada tahun 1995-1997, (b). Proyek “*Good government* bidang pendidikan” di Menpan-RI tahun 1997-1999, (c). Proyek “Desentralisasi Pendidikan Dasar di NTT, NTB, Bali dan DKI Jakarta” pada tahun 2002-2010. Dan (d). Program “Evaluasi Kinerja Sekolah Bertaraf Internasional” pada proyek *Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP)* pada tahun 2011-2012
- 2) Konsultan *World Bank* untuk proyek Perencanaan dan Pengembangan program SD-SMP Satap tahun 2007-2014.
- 3) Konsultan pada lembaga donor *Uni Eropa* untuk proyek “Perencanaan bantuan dana *Block Grant* untuk peningkatan kapasitas dan pengadaan infrastruktur SD-SMP Satap” pada tahun 2009-2012.
- 4) Konsultan ILO (*International Labour Organization*) untuk *Projection Education and Skill Training* pada tahun 2010-2012.
- 5) Konsultan ”Program Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Gowa-Sulawesi Selatan sejak 2007-sampai sekarang.
- 6) Konsultan ” Program Imtaq Indonesia untuk Anak SD Kelas I dan II” di Gowa-Sulawesi Selatan sejak 2014-sampai sekarang.

Sedangkan buku yang terbit nasional yang pernah ditulis, antara lain adalah:

- 1) Buku Statistik Terapan Untuk Pendidikan dan Ilmu Sosial 1997, dan buku Penelitian Sosial 1999 keduanya diterbitkan PT. Rineka Cipta Jakarta tahun.
- 2) Buku Tatakelola Organisasi Sekolah (Kajian teoritis dan Aplikasi) 2010, diterbitkan PT. Arman delta Selaras Jakarta
- 3) Tatakelola Perpustakaan Sekolah (Kajian teoritis dan Aplikasi) 2011, diterbitkan PT. Armandelta Selaras Jakarta
- 4) Buku Tatakelola Pengembangan KTSP dan Model Pembelajaran yang efektif 2012, diterbitkan PT. Armandelta Selaras Jakarta.
- 5) Buku Fungsi dan Aplikasi Teori Dalam Penelitian Sosial (2017), diterbitkan UPT Penerbitan Universitas Jember.
- 6) Buku Paradigma, Rancangan dan Proposal Ragam Penelitian Kualitatif (2019), Diterbitkan LaksBang, Yogyakarta
- 7) Buku Profesi Kependidikan (2019), Diterbitkan LaksBang, Yogyakarta
- 8) Metode Sejarah Lisan (2020) Diterbitkan LaksBang, Yogyakarta

Jember, 02 Juli 2020

Penulis:

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd.